

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Abdulkadir Muhammad, 1986, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung.

Atep Adya Barata, 2003, *BPHTB Menghitung Obyek dan cara Mengajukan Keberatan Pajak*, Elex Media Komputindo, Jakarta.

Bambang Sugugono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, 1999, Karya Unipress, Jakarta.

Djoko Muljono, 2010, *Panduan Brevet Pajak-PPN, PPn.BM, Bea Materai, PBB, BPHTB*, Andi Offset, Yogyakarta.

Effendi Perangin-angin, 1986, *Hukum Agraria Indonesia Suatu Telaah dari Pandang Praktisi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

_____, 1994, *Hukum Agraria di Indonesia, suatu telaah dari sudut pandang Praktisi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Gazi Inayah, al-Iqtishad al-Islami az-Zakah wa ad-dharibah, Dirasah Muqaranah, 1995, *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak*. Edisi terjemah oleh Zainuddin Adnan dan Nailul Falah Tiara Wacana, Yogyakarta.

Gusfahmi, 2011, *Pajak Menurut Syariah*, Rajawali Pers, Jakarta.

_____, 2007, *Pajak Menurut Syariah*, Rajawali Press, Jakarta.

Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, “Apakah ada kewajiban lain di luar zakat? Nabi menjawab,”Tidak ada, kecuali shadaqah sunnah”. (HR Bukhari dan Muslim).

K. Wantjik Saleh, 1982, *Hak Anda Atas Tanah*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Mardiasmo, 2001, *Perpajakan Edisi Revisi ANDI*, Yogyakarta.

_____, 2005, *Perpajakan (edisi revisi)*, Andi Offset, Yogyakarta.

_____, 2006, *Perpajakan (edisi revisi)*, Andi Offset, Yogyakarta.

Marihot P. Siahaan, 2003, *Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Nico, 2003, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center for Documentation Studies of Business Law (CDSBL), Yogyakarta.

Qiram Syamsuddin Meliala, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Liberty Yogyakarta.

Rochmat Soemitro, 1974, *Pajak dan Pembangunan*, Eresco, Bandung-Jakarta.
_____, 1991, *Asas dan dasar Perpajakan 2*, Eresco. Bandung.

Sartono Kartodirdjo, 1983, *Metodologi Penelitian Masyarakat*. Jakarta Gramedia.

Siti Resmi, 2004, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Salemba Empat, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Umer Chapra, 2000, *Islam and The Economic challenge. (Herndon: IIIT, 1995)*. Diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta.

b. Wawancara

Edy Riyanto, PPAT di Kabupaten Grobogan, wawancara tanggal 13 juli 2016.

Muslikan. Wajib Pajak BPHTB/Para pihak yang melakukan transaksi, wawancara tanggal 27 juli 2016.

Mustain. Wajib Pajak BPHTB/Para pihak yang melakukan transaksi, wawancara tanggal 19 juli 2016.

Ratno Adji, PPAT di Kabupaten Grobogan, wawancara tanggal 14 juli 2016.

Rusdiyono, PPAT di Kabupaten Grobogan, wawancara tanggal 13 juli 2016.

Siti Munawaroh. Wajib Pajak BPHTB/Para pihak yang melakukan transaksi, wawancara tanggal 27 juli 2016.

Suyatno, PPAT di Kabupaten Grobogan, wawancara tanggal 18 juli 2016.

Triyono. Wajib Pajak BPHTB/Para pihak yang melakukan transaksi, wawancara tanggal 18 juli 2016.

Wakiyo, PPAT di Kabupaten Grobogan, wawancara tanggal 16 juli 2016.

Winarsih, Kasi Pendaftaran dan Pendataan DPPKAD, wawancara tanggal 19 juli 2016.

Zaini. Wajib Pajak BPHTB/Para pihak yang melakukan transaksi, wawancara tanggal 21 juli 2016.

c. Peraturan Perundang-Undangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 *tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria.*

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 *tentang Jabatan Notaris.*

Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan .*

Undang-undang nomor 20 tahun 2000 tentang *Perubahan atas Undang-undang nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.*

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 *Tentang Otonomi Daerah.*

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak daerah.*

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996 Tentang *Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan* Pasal 4 Juncto Pasal 8.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Tentang *Pembayaran Pajak Penghasilan dari Peralihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan,* Pasal 1.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang *Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah.*

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang *Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah.*

Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2000 ***Tentang Penentuan Besarnya NPOP-TKP BPHTB.***

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2000 ***Tentang Pajak Daerah.***

Departemen Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan Tentang ***Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan,*** Kepmen Keuangan No.517/KMK.04/2000, Pasal 4 ayat (1).

Kode Etik PPAT